

GENDER GAP DALAM DISTRIBUSI PENDIDIKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Astuti Rahayu¹

Abstract

Equal access of education is one of the basic human rights and it's also a component of well being. This paper investigates the gender gap in education equality in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) by computing the Educational Gini Index and drawing the Education Lorenz Curve in specific region, Gunungkidul. At least, two findings are generated in this study : first, gender gap in education equality among male and female is exist. Second, Education Lorenz Curve is worse in female than Education Lorenz Curve in male.

PENDAHULUAN

Tiga faktor penentu pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya modal, sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi. Terkait dengan sumber daya manusia, penduduk yang berkualitas merupakan sumber daya yang potensial dalam pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitasnya adalah dengan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal karena pendidikan berguna untuk menggapai kehidupan yang lebih memuaskan dan berharga (Todaro, 2003:434). Oleh karena itu pendidikan dikenal dan diakui secara luas sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan. Namun seringkali pendidikan menghadapi masalah yang sangat kompleks diantaranya pemerataan pendidikan di masyarakat, alokasi dana pendidikan yang relatif rendah dari pemerintah, dan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.

Kemerataan atau distribusi pendidikan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Lopez, Thomas, dan Wang pada tahun 1998 tentang distribusi pendidikan dengan menggunakan koefisien Gini menemukan bahwa koefisien Gini di beberapa negara sangat bervariasi (Thomas, et., al., 2000: 207). Agar pendidikan lebih merata, sejak 1980 Negara Berkembang telah melakukan investasi cukup besar dalam pelayanan pendidikan. Namun pengeluaran pemerintah yang besar saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pengalokasian yang tepat. Jika hal ini terjadi maka hanya akan memberikan sedikit sumbangan terhadap pengurangan kemiskinan, bahkan mungkin sebaliknya dapat memperbesar ketimpangan. Selama ini kemajuan yang belum merata di banyak negara karena kurangnya akses terhadap pendidikan dasar masih menjadi tantangan besar.

Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan, karena merupakan investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat modal fisik, dan kemampuan menyesuaikan teknik yang diterapkan pada mesin-mesin industri. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi pendidikan untuk memberikan bekal pada tenaga kerja agar memiliki kemampuan adaptasi, memiliki keahlian yang dibutuhkan pada pasar, mengembangkan sikap yang mudah menerima informasi, sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bangsa (*World Development Report*, 1996:123).

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, email : astuti_ra@yahoo.com

Disparitas atau perbedaan dalam pendidikan merupakan salah satu dari banyak aspek dalam pendidikan, namun perbedaan itu juga terkait dengan alokasi investasi publik yang tidak tepat, perang, kekayaan, jurang antar gender, dan krisis ekonomi. Banyak penelitian yang menemukan bahwa pendidikan orang tua, pendapatan rumah tangga, maupun kekayaan mempengaruhi pencapaian prestasi pendidikan anak-anak. Distribusi pendidikan mempunyai implikasi kuat terhadap dampak pertumbuhan yang dapat mengurangi kemiskinan.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal pendidikan bertitik tolak pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Sejak awal Repelita IV pemerintah berhasil mencanangkan program Wajib Belajar 6 tahun, yang kemudian diperluas menjadi Wajib Belajar 9 tahun dan sekarang Wajib Belajar 12 tahun. Upaya lain yang dilakukan adalah menandatangani 8 butir *Millenium Development Goals (MDGs)* yang disetujui bulan September 2000 oleh 198 negara. Salah satu butirnya adalah pencapaian pendidikan dasar secara universal selain dukungan kesamaan gender dan pemberdayaan wanita. Kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai pemerataan distribusi layanan pendidikan bagi masyarakat, terutama pendidikan dasar baik bagi laki-laki dan perempuan (Todaro, 2003:31).

Menurut Sensus Ekonomi, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan dalam tatanan makro adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia yang buta huruf sebesar 9,82 persen jumlah tersebut menurun menjadi 3,89 persen pada tahun 2008. Dalam hal kesamaan gender, di hampir setiap negara berkembang anak-anak perempuan ternyata memperoleh pendidikan yang jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Di 66 dari 108 negara, jumlah anak perempuan yang duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah lebih kecil setidaknya 10 persen dibandingkan jumlah anak laki-laki. Kesenjangan pendidikan antar gender yang paling besar ditemukan di negara-negara miskin di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Upaya mempelajari distribusi layanan pendidikan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka karena mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Banyak bukti empiris yang menyatakan bahwa menghilangkan diskriminasi pendidikan terhadap kaum perempuan menguntungkan secara ekonomi. Banyak studi yang mempelajari ketimpangan pendidikan dengan menggunakan Koefisien Gini maupun kurva Lorenz yang dianggap sebagai indikator yang baik untuk mengukur ketimpangan.

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 5 kabupaten/kota merupakan wilayah yang dianggap dinamis dalam pembangunan, termasuk layanan pendidikan. Apalagi sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000. Yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah pembangunan di bidang pendidikan tersebut masih terdapat *gender gap*, yaitu perbedaan layanan pendidikan untuk laki-laki dan perempuan? Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui terjadinya *gender gap* (kesenjangan laki-laki dan perempuan) dalam distribusi pendidikan di 5 kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu 2000 ke 2008, (2) mengetahui perubahan bentuk kurva Lorenz Pendidikan

Penelitian tentang ketimpangan pendidikan dilakukan oleh ahli ekonomi, dengan mengambil banyak bentuk penelitian di berbagai negara yang menempatkan paradigma pendidikan sebagai salah satu modal utama pembangunan. Qian dan Russel (2005) meneliti tentang ketimpangan regional di China dengan melihat ketimpangan antar propinsi di daerah pesisir dan pedalaman, dibandingkan dengan ketimpangan propinsi di daerah desa dan kota. Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) ketimpangan pendidikan di daerah pesisir dan

pedalaman tidak setajam ketimpangan pendapatan, 2) gap desa dan kota terhadap pendidikan merupakan penyebab dominan terhadap ketimpangan pencapaian pendidikan secara keseluruhan.

Vinod Thomas, Yan Wang, Xibo Fan (2000) mengukur ketimpangan pendidikan dengan menggunakan data panel. Penelitian dilakukan untuk 85 negara, dengan periode waktu 5 tahunan mulai tahun 1960 hingga tahun 1990. kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Ketimpangan pencapaian pendidikan telah menurun di kebanyakan negara selama 3 dekade yaitu 1960-1990, dengan pengecualian di Columbia, Hongaria, Peru, dan Venezuela yang naik pelan sejak 1980.
2. Ada hubungan negatif dan signifikan antara ketimpangan pendidikan dengan rata-rata bersekolah. Ini mengimplikasikan bahwa negara dengan tingkat pencapaian pendidikan yang tinggi, paling mungkin mencapai pemerataan pendidikan daripada negara dengan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah.
3. Kurva Kuznets akan terlihat nyata, jika data yang digunakan adalah standar deviasi pendidikan, yang juga diperlihatkan oleh hasil regresi.
4. Jurang gender dalam pendidikan semakin kuat.
5. Ketimpangan yang diukur dengan Indeks Gini Pendidikan berhubungan negatif dengan kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita.
6. Indeks Gini pendidikan dapat menjadi indikator baru untuk dimensi sumber daya manusia dan kesejahteraan, dimana fasilitas pendidikan dapat dibandingkan antar negara dan antar waktu.

Penelitian lain yang juga memfokuskan pada distribusi pendidikan dan pertumbuhan dalam dari Ramon Lopez, Vinod Thomas, dan Yan Wang (1998) dengan menggunakan data setiap 5 tahun (*quinquennial*) dari 20 negara yang kebanyakan berpendapatan menengah. Penelitian ini mengestimasi fungsi produksi dengan pendidikan yang tak dapat diperdagangkan setelah dikontrol dengan modal fisik, tenaga kerja, dan Koefisien Gini yang diestimasi dengan data pencapaian prestasi. Penelitian ini menggunakan data tahun (1970-1994), dan hasilnya adalah:

1. Distribusi pendidikan menentukan tingkat pendapatan maupun pertumbuhan.
2. Dengan menggunakan deviasi standar dalam logaritma sebagai ukuran lain penyebaran pendidikan, ternyata memberikan efek yang lebih besar pada pendapatan per kapita. Kebanyakan dari koefisien sangat signifikan. Distribusi dari pendidikan dan akses yang sama pada pendidikan merupakan kunci. Distribusi yang tak sama di bidang pendidikan akan mempunyai kecenderungan negatif pada pendapatan per kapita. Hal lain yang penting adalah adanya hubungan antara kebijakan pendidikan dan kebijakan ekonomi pembuat kebijakan ekonomi harus mengukur bahwa investasi di bidang pendidikan termasuk pemerataan pendidikan merupakan hal penting untuk kesuksesan perekonomian suatu negara.
3. Keterbukaan dan reformasi perdagangan memperbaiki produktivitas modal manusia dalam model-model pertumbuhan.

METODE

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY meliputi: data proporsi populasi penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan baik untuk laki-laki dan perempuan, dan lama sekolah setiap tingkatan pendidikan.

1. Indeks Gini Pendidikan (IGP): merupakan ukuran agregat dalam distribusi pendidikan yang angkanya berkisar antara 0 (menunjukkan merata sempurna) dan 1 (tidak merata sempurna). Kriteria pemerataan untuk IGP yang digunakan mengikuti Todaro sebagai berikut (Todaro 2007 : 238) :
 - 0,71 ke atas : pemerataan sangat rendah
 - 0,5 – 0,70 : pemerataan rendah
 - 0,36 – 0,49 : pemerataan sedang
 - 0,21 – 0,35 : pemerataan tinggi
 - Kurang dari 0,20 : pemerataan sangat tinggi
2. Rata-rata tahun bersekolah (RS): adalah lamanya menikmati bangku sekolah (dalam tahun), dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
3. *Gender Gap* (GG): adalah gap (jurang perbedaan) antara laki-laki dan perempuan dalam pemerataan pendidikan, dan GG terjadi jika IGP perempuan lebih buruk dibandingkan IGP laki-laki.
4. Kurva Lorenz Pendidikan : adalah kurva yang digunakan untuk melihat perubahan pemerataan distribusi pendidikan. Semakin mendekati garis diagonal, distribusi semakin merata. Semakin menjauhi garis diagonal, distribusi semakin timpang atau semakin tidak merata.
1. Untuk menganalisis *gender gap* distribusi pendidikan digunakan IGP. Hasilnya dibandingkan antara IGP perempuan dan laki-laki. Rumus IGP mengikuti rumus yang digunakan oleh Thomas, Vinod, Yan Wang, dan Xibo Fan (2000), sebagai berikut :

$$IGP = \frac{1}{RS} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n p_i |y_i - y_j| p_j$$

Keterangan :

IGP = Indeks Gini Pendidikan

RS = Rata-Rata tahun bersekolah

p_i dan p_j = proporsi populasi berdasarkan tingkat pencapaian pendidikan

y_i dan y_j = lamanya (tahun) bersekolah pada tingkat pencapaian pendidikan yang berbeda.

n = jumlah pencapaian sekolah pada data

Sedangkan rumus rata-rata tahun bersekolah sebagai berikut :

$$RS = \sum_{i=1}^n p_i \cdot y_i$$

Keterangan :

RS = Rata-rata tahun bersekolah

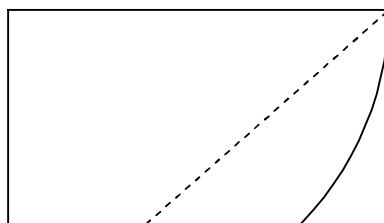
p = proporsi populasi

y = lamanya (tahun) bersekolah

Mengingat ketersediaan data, penelitian ini menggunakan $n = 6$ dengan kategori dan lamanya (tahun) bersekolah sebagai berikut : 1) buta huruf = 0 tahun, 2) tak tamat SD = 3 tahun, 3) tamat SD = 6 tahun, 4) tamat SMP = 9 tahun, 5) tamat SMA = 12 tahun, 6) universitas = 15 tahun. Pada tingkat universitas, karena ada jenjang D1 hingga S3 maka penghitungan lama pendidikan di tingkat perguruan tinggi dilakukan dengan menghitung rata-rata. Dalam penelitian ini dengan 3 cara : rata-rata ukur, rata-rata kuadrat, dan rata-rata harmonik, memberikan hasil yang relatif sama, yaitu 3 tahun.

2. Untuk mencapai tujuan 2, digunakan Kurva Lorenz Pendidikan, sebagai berikut :

Proporsi



Kumulatif
Pendidikan
(S)

-----> Kurva Lorenz

Proporsi kumulatif populasi (Q)

Gambar 1 : Kurva Lorenz Pendidikan

Proporsi kumulatif populasi (Q) pada masing-masing tingkatan sekolah mengikuti perhitungan sebagai berikut :

- Buta huruf = $Q1 = p1$
- Tak tamat SD = $Q2 = p1 + p2$
-
- Universitas = $Q6 = p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 = 100\%$

Sedangkan proporsi kumulatif pendidikan (S) mengikuti perhitungan sebagai berikut :

- Buta huruf = $S1 = (p1.y1)/RS$
- Tak tamat SD = $S2 = (p1.y1 + p2.y2)/RS$
-
- Universitas = $S6 = (p1.y1 + p2.y2 + p3.y3 + p4.y4 + p5.y5 + p6.y6)/RS = RS/RS = 100\%$

Keterangan :

p1 = proporsi populasi buta huruf

p2 = proporsi populasi tak tamat SD

p6 = proporsi populasi universitas

y1 = lamanya (tahun) bersekolah

y2 = lamanya (tahun) bersekolah tak tamat SD

y3 = lamanya (tahun) bersekolah universitas

PEMBAHASAN

Perhitungan IGP di 5 kabupaten/kota di DIY kurun waktu tahun 2000 ke 2008 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan hasil sebagai berikut :

IGP Laki-Laki

Dari tabel 1 dapat dianalisis bahwa IGP laki-laki dari tahun 2000 ke tahun 2008 mengalami penurunan yang berarti pemerataan dalam pencapaian pendidikan meningkat. Pada tahun 2000 IGP terendah dicapai oleh Kota Yogyakarta dengan angka 0,2127 ini berarti pemerataan dalam distribusi pendidikan tergolong tinggi. Dan nilai IGP tertinggi dicapai oleh Kabupaten Gunung Kidul dengan angka 0,4039 yang berarti pemerataan dalam distribusi pendidikan tergolong sedang.

Tabel 1.

Indeks Gini Pendidikan Laki-laki, 2000 dan 2008

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Penurunan
		2000	2008	
1	Kulonprogo	0,3114	0,2645	0,0469
2	Bantul	0,3541	0,2689	0,0852
3	Gunungkidul	0,4039	0,2962	0,1077
4	Sleman	0,2678	0,1988	0,0690
5	Yogyakarta	0,2127	0,1789	0,0338

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Propinsi DIY 2008, diolah

Begitu juga pada tahun 2008, IGP terendah masih dicapai oleh Kota Yogyakarta dengan nilai 0,1789 yang berarti pemerataan sangat tinggi, dan IGP tertinggi tetap Kabupaten Gunungkidul dengan 0,2962 yang berarti pemerataan tinggi. Selama kurun waktu 2000 ke 2008 tersebut, penurunan IGP tercepat dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul yang pada tahun 2000 pemerataan sedang, menjadi pemerataan tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa distribusi layanan pendidikan di wilayah Gunungkidul telah mencapai perubahan yang paling besar di DIY jika diukur dengan IGP. Setelah Gunung Kidul penurunan IGP terbesar disusul oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, dan yang terakhir Kota Yogyakarta.

IGP Perempuan

Sedangkan untuk IGP perempuan tahun 2000 dan 2008 dapat dianalisis sebagai berikut :

Tabel 2.

Indeks Gini Pendidikan Perempuan, 2000 dan 2008

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Penurunan
		2000	2008	
1	Kulonprogo	0,4342	0,2767	0,1575
2	Bantul	0,4277	0,2961	0,1316
3	Gunungkidul	0,5241	0,2824	0,2417
4	Sleman	0,3895	0,2605	0,1290
5	Yogyakarta	0,2599	0,2240	0,0359

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Propinsi DIY 2008, diolah

Dari tabel 2 dapat dianalisis bahwa IGP perempuan dari tahun 2000 ke tahun 2008 mengalami penurunan yang berarti pemerataan dalam pencapaian pendidikan meningkat. Pada tahun 2000 IGP terendah dicapai oleh Kota Yogyakarta dengan angka 0,2599 ini berarti pemerataan dalam distribusi pendidikan tergolong tinggi. Dan nilai IGP tertinggi dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul dengan angka 0,5241 yang berarti pemerataan dalam distribusi pendidikan tergolong rendah.

Begitu juga pada tahun 2008, IGP terendah masih dicapai oleh Kota Yogyakarta dengan nilai 0,2240 yang berarti pemerataan tinggi, namun IGP tertinggi ada pada Kabupaten Bantul dengan 0,2961 yang juga berarti pemerataan tinggi. Selama kurun waktu 2000 ke 2008 tersebut, penurunan IGP tercepat dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul yang pada tahun 2000 pemerataan rendah, menjadi pemerataan tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan layanan pendidikan di wilayah Gunungkidul untuk perempuan telah mencapai hasil yang paling menggembirakan di DIY jika diukur dengan IGP. Setelah Gunung Kidul penurunan IGP terbanyak disusul oleh Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan yang terakhir Kota Yogyakarta.

Gender Gap IGP di DIY tahun 2000 ke 2008

Jika dibandingkan IGP laki-laki dan perempuan di DIY selama kurun waktu 2000 ke 2008, maka perhitungannya dapat disajikan dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3.
Indeks Gini Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2000 dan 2008 di DIY

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2000		Tahun 2008	
		Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
1	Kulonprogo	0,3114	0,4342	0,2645	0,2767
2	Bantul	0,3541	0,4277	0,2689	0,2961
3	Gunungkidul	0,4039	0,5241	0,2962	0,2824
4	Sleman	0,2678	0,3895	0,1988	0,2605
5	Yogyakarta	0,2127	0,2599	0,1789	0,2240
	Rerata	0,3100	0,4071	0,2415	0,2679

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Propinsi DIY 2008, diolah

Dari Tabel 3 jika dilihat dari IGP masing-masing kabupaten juga menunjukkan hal yang sama, kecuali Gunungkidul tahun 2008 IGP laki-laki lebih besar dari perempuan, dengan selisih yang sangat tipis. Tetapi secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rata-rata IGP pada tahun 2000 dan 2008 bagi laki-laki memang berbeda dengan perempuan. IGP laki-laki lebih kecil angkanya, yang menunjukkan kondisi yang lebih merata meskipun jika dilihat hasil rata-rata IGP Propinsi DIY tahun 2000 sebesar 0,3100 (laki-laki) dan 0,4071 (perempuan) berada pada kriteria pemerataan sedang. Pada tahun 2008 juga demikian, nilai IGP laki-laki lebih kecil yaitu 0,2415 dibandingkan perempuan yang memiliki IGP sebesar 0,2679. Meskipun pada tahun 2008 keduanya berada pada kriteria pemerataan tinggi, namun tetap saja IGP perempuan lebih rendah.

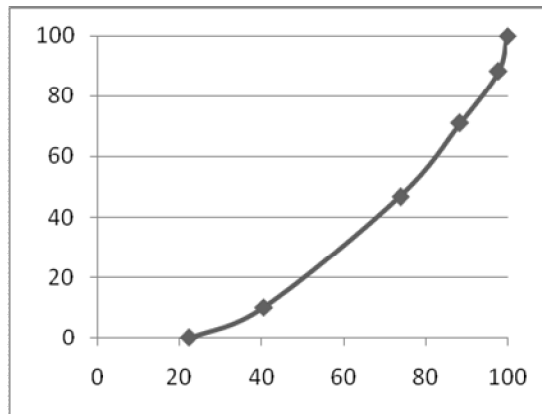
Kondisi demikian jelas menunjukkan bahwa memang telah terjadi *gender gap* dalam distribusi pendidikan di DIY, dimana pemerataan pendidikan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Memang layanan pendidikan bagi masyarakat dari tahun 2000 ke 2008 menjadi lebih baik, namun ternyata Propinsi DIY belum dapat menghilangkan *gender gap* dalam pendidikan.

2. Kurva Lorenz Pendidikan

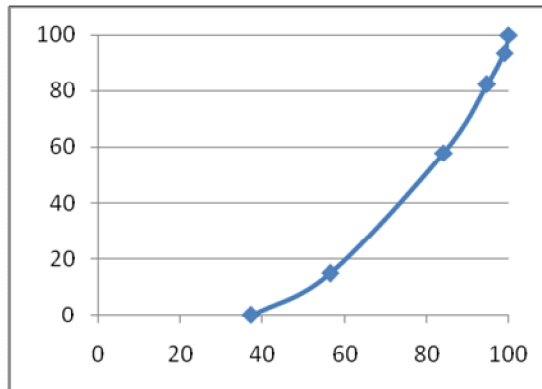
Pada analisis ini akan disajikan bentuk perubahan Kurva Lorenz Pendidikan pada tahun 2000 dan 2008 bagi daerah yang mencolok. Yaitu Gunungkidul yang memiliki pemerataan terendah, sekaligus perubahan tercepat dalam membangun pemerataan pendidikan.

Kurva Lorenz laki-laki dan perempuan tahun 2000 :

Jika dibandingkan, maka terlihat bahwa kurva Lorenz perempuan lebih ke kanan (menjauhi garis diagonal) yang berarti lebih tidak merata. Ini memperkuat hasil IGP, bahwa telah terjadi ketimpangan pendidikan antar gender (*gender gap*) tahun 2000 di Kabupaten Gunungkidul.



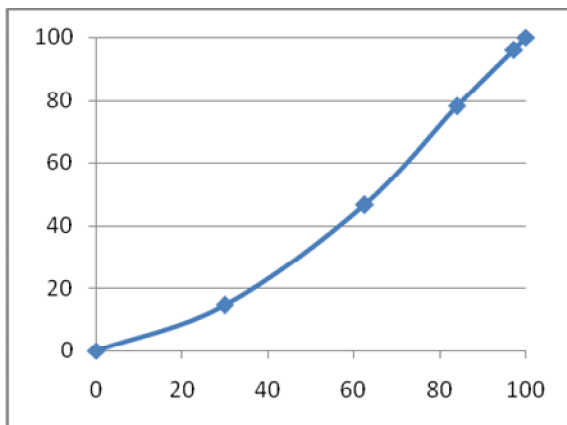
Gambar 2 . Kurva Lorenz Laki-laki tahun 2000



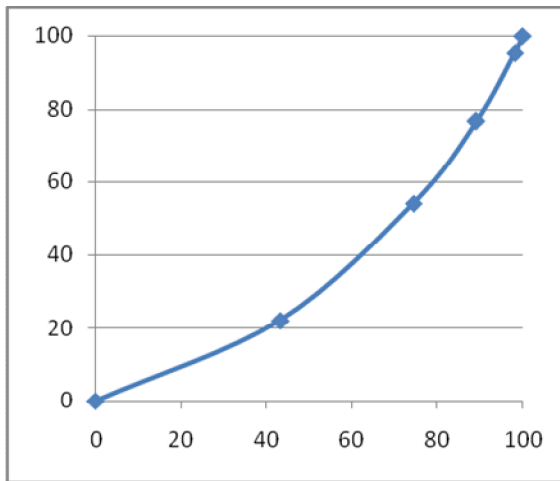
Gambar 3: Kurva Lorenz Perempuan, tahun 2000

Kurva Lorenz laki-laki dan perempuan tahun 2008 :

Begitu juga yang terjadi ketika Kurva Lorenz tahun 2008 dibandingkan antara laki-laki dan perempuan. Kurva Lorenz perempuan lebih menjauhi garis diagonal, sehingga lebih tidak merata. Atau terjadi *gender gap* dalam pembangunan pendidikan.



Gambar 4: Kurva Lorenz Laki-laki, Tahun 2008



Gambar 5 : Kurva Lorenz Perempuan, Tahun 2008

Dari hasil a dan b tersebut semakin memperkuat analisis bahwa memang di DIY telah terjadi *gender gap* di bidang pemerataan pendidikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil perhitungan baik dengan IGP ataupun dengan kurva Lorenz adalah :

1. Nilai IGP perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan IGP laki-laki di hampir seluruh kabupaten/kota di DIY selama periode penelitian. Ini mengindikasikan terjadinya *gender gap* dalam pemerataan distribusi pendidikan.
2. Kurva Lorenz Perempuan lebih menjauhi garis diagonal dibandingkan dengan kurva Lorenz laki-laki. Hal ini semakin memperkuat kesimpulan pertama bahwa telah terjadi *gender gap* dalam distribusi pendidikan.

Saran yang dapat diberikan adalah :

Pemerintah perlu lebih memperhatikan layanan pendidikan bagi perempuan, dengan cara :

- memberikan bantuan biaya pendidikan lebih banyak bagi perempuan yang putus sekolah
- memberikan kemudahan lebih banyak kejar paket baik A, B, C, untuk perempuan
- penyelenggaraan pendidikan tersebut diatur waktunya sehingga perempuan yang telah berkeluarga dapat mengikuti kegiatan tanpa mengganggu tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand and SMR Kahbur, 1993, "The Kuznets Process and The Inequality Development Relationship", *Journal of Development Economics*, February 1993.
- Bayhaqi, Ahmad, 2000, *Education and Macroeconomic Performance in Indonesia : A Comparison with Other ASEAN Economies*, Visiting Researchers Series No. 13(2000), World Bank.
- Barro, Robert J., 1999, *Inequality and Growth in a Panel Countries*, presented at a conference at the American Enterprise Institute, Harvard University.

- Birdsall, Nancy dan Juan Luis Londono, 1997, *Asset Inequality Matters : An Assessment of the World Bank's Approach to Poverty Reduction*; American Economic Review 87 (2); 32-37.
- Easterly, William, 2001, *Inequality Does Cause Under Development*, World Bank, USA
- Lopez, Ramon, Vinod Thomas, Yan Wang, 1998, *Addressing The Education Puzzle : The Distribution of Education and Economic Reform*, the Word Bank.
- Qian, Xiaoley, and Russel Smith, 2005, *Measuring Regional Inequality of Education in China: Widening Coast-Inland Gap or Widening Rural-Urban Gap?*, ABERU Discussion Paper 12, Monash Univ. Australia.
- Ravallion, Martin dan Gaurav Datt, 1999, *When Is Growth Pro Poor? Evidence from the Diverse Experiences of India's States*, World Bank Group, Washinton DC.
- Soeratno, Lincolin Arsyad, 1998, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P., 2007, *Economic Development*, 9th ed., London Addison Wesley, Longman Limited.
- Thomas, Vinod, Yan Wang, Xibo Fan, 2000, *Measuring Education Inequality : Gini Coefficients of Education*, World Bank.
- Thomas, Vinod, dkk., 2001, *The Quality Of Growth ; Kualitas Pertumbuhan*, Penerjemah Marcus Prihminto Widodo, diterbitkan untuk Bank Dunia, Penerbit Gramedia, Jakarta.